

KEBERHASILAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DARI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020

Sintawati¹, Hendramawat Aski Safarizki^{2*}, Iwan Ristanto³

^{1,2,3} Program Studi Teknik Sipil, Universitas Veteran Bangun Nusantara

Jl. Letjen Sudjono Humardhani, No.1, Jombor, Sukoharjo, Jawa Tengah

*Email: hendra.mawat@gmail.com

Abstrak

Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Wonogiri adalah 25.002 unit. Pada Tahun 2020 Kabupaten Wonogiri mendapatkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR sejumlah 680 unit di 6 Kecamatan yang tersebar di 19 Desa di Kabupaten Wonogiri. Program Peningkatan Kualitas RTLH Program BSPS adalah Bantuan Stimulan yang memacu Penerima Bantuan untuk melakukan Swadaya agar pembangunan rumah berhasil. Jenis swadaya berupa uang dan material. Berdasarkan dari hasil analisis jumlah Swadaya terbesar dari 6 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tirtomoyo sejumlah Rp 15.990.250,- dan Swadaya terendah di Kecamatan Jatiroto sebesar Rp 7.997.000,-. Berdasarkan analisa kedua bahwa Keberhasilan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Wonogiri dapat terukur dari tingkat kelayakan < 35 % menjadi 90 – 100 % dan dengan melihat hasil pembangunan dari RTLH menjadi Rumah Layak Huni yang pembangunannya sesuai dengan spesifikasi Teknis Rumah Sehat.

Kata kunci: BSPS, RTLH, Swadaya masyarakat, Peningkatan Kualitas

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah persoalan klasik yang mendera hampir di setiap kabupaten/kota di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Kabupaten Wonogiri berdasarkan data Pembaruan Basic Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 memiliki RTLH sebanyak 43.232 unit, RTLH. Dan pada awal tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri melaksanakan Verifikasi dan Validasi RTLH, dan dari pendataan tersebut diperoleh data jumlah RTLH Kabupaten Wonogiri adalah 25.002 unit.

Pemerintah kabupaten sangat optimis dapat menurunkan jumlah RTLH dengan cepat dengan melakukan intervensi dengan berbagai program dan sumber dana dalam rangka menuntaskan RTLH di Kabupaten Wonogiri.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Wonogiri mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni dari Dana APBN yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejumlah 680 unit. Dengan Alokasi yang tersebar di 6 Kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Pada hakikatnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni, namun dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat (Desiana, 2016).

Menurut para ahli kemiskinan itu bersifat multidimensional, karena kebutuhan manusia itu macam-macam, maka kemiskinan memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik dan pengetahuan juga keterampilan. Dan aspek skunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad, 2015). Sebagaimana kita ketahui bahwa kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang salah satunya kebutuhan tempat tinggal yang layak. Hal ini terjadi karena ketidakberdayaan mereka untuk memenuhi rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Dengan adanya bantuan peningkatan Kualitas RTLH untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Wonogiri Program BSPS dapat meningkatkan kualitas hunian/ tempat tinggal yang lebih baik.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan

dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Swadaya masyarakat adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mewujudkan sebuah keinginan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Ciri khas dari suatu inisiatif atau kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumber-sumber

daya yang dimiliki sendiri oleh individu atau kelompok (Verhagen, 1996). Sebenarnya dengan munculnya swadaya masyarakat berarti ada kepedulian, ada kesadaran bahwa manusia tidak bisa berdiri sendiri melainkan saling membutuhkan dan saling melengkapi.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018).

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas hidup untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan (Burns, Keswell and Leibbrandt, 2005). Kebijakan pembangunan belum mengikutsertakan masyarakat miskin dalam pengelolaan kota (Cage, 2014). Padahal dengan adanya partisipasi masyarakat dapat membantu peningkatan pemahanan akan kebutuhan dan prioritas pembangunan (Cherunya *et al.*, 2021).

Berkait hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawab bagaimana mengukur Stimulan Swadaya masyarakat untuk keberhasilan pembangunan rumah tidak layak huni serta mengetahui tingkat keberhasilan stimulan swadaya masyarakat terhadap Dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Lokasi tempat penelitian berada di 19 Desa di 6 kecamatan di Kabupaten Wonogiri yaitu kecamatan Bulukerto, Purwantoro, Tirtomoyo, Jatiroto, Wonogiri, dan Slogohimo. Untuk mencapai keberhasilan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data terdiri dari: Observasi, Wawancara dan Diskusi, dan Dokumentasi. Analisis data merupakan sebuah proses tindak lanjut dari pengolahan data. Data yang sudah diolah sedemikian rupa kemudian dianalisis dan diklasifikasikan menjadi kelompok khusus sesuai dengan jenis datanya hingga dihasilkan data yang tersusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Wonogiri mendapatkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 680 unit. Lokasi berada di desa/kelurahan dengan tingkat kesejahteraan rendah dan sedang. Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah Nomor 765-785/KPTS/SNVTPPJATENG /2020 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berupa Uang Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Agustus 2020, daftar desa penerima BSPS sebagai mana terdapat pada Tabel 1. Daftar desa penerima BSPS.

Pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Wonogiri Pembangunan ini merupakan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat dengan metode pelaksanaan berdasarkan prinsip pengelolaan. Untuk mensukseskan program ini tentunya sangat diharapkan peran serta masyarakat. Program ini diselenggarakan bersama masyarakat secara terbuka berdasarkan musyawarah serta melibatkan masyarakat baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong.

Beda hal nya dengan keberhasilan dari program ini dilihat dengan terbangunnya rumah yang layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin yang ditandai dengan tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat waktu serta berkelanjutan. Melalui program bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan papannya, karena masyarakat yang

berpenghasilan rendah atau kemiskinan pada umumnya membuat masyarakat hanya memenuhi kebutuhan pangan dan sandang. Perlu adanya peran yang serius dari pemerintah dalam menangani angka kemiskinan dan melalui program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni sebagaimana mestinya.

Tabel 1. Daftar desa penerima BSPS.

No	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah penerima BSPS
1	Bulukerto	Bulurejo	20
		Geneng	30
		Bulukerto	40
		Nadi	30
2	Purwanto	Ploso	40
		Gondang	40
		Biting	20
		Kepyar	80
		Sumber	80
		Bakalan	40
3	Tirtomoyo	Sidorejo	50
		Hargantoro	50
4	Jatiroto	Brenggolo	45
		Guno	8
5	Wonogiri	Giriwono	27
		Purwosari	20
		Sonoharjo	20
		Wonokerto	20
6	Slogohimo	Karang	20
Jumlah			680

Sumber: Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah Nomor 765-785/KPTS/SNVTPPJATENG /2020 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berupa Uang Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Agustus 2020

Masyarakat yang akan mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diwajibkan untuk swadaya agar pelaksanaan Program ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Keswadayaan masyarakat atau calon penerima bantuan dapat berupa uang, material atau bahan bangunan, dan tenaga kerja. Sumber swadaya dapat berasal dari keluarga inti, keluarga besar, ataupun gotong royong masyarakat sekitar. Besar dana swadaya dari 6 Kecamatan yang disurvei tampak pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Swadaya Pelaksanaan Peningkatan Kualitas RTLH Program BSPS Kab.Wonogiri untuk 1 Rumah

No	Kecamatan	Jumlah Swadaya (Rp)	Prosentase Jumlah Swadaya Terhadap Besar Bantuan
1	Wonogiri	13.947.615	80%
2	Tirtomoyo	15.990.250	91 %
3	Slogohimo	14.429.550	82 %
4	Jatiroto	7.997.000	46 %
5	Purwanto	11.488.517	66 %
6	Bulukerto	12.998.900	74 %

Sumber: Pengolahan data lapangan

Dari tabel 2 didapatkan untuk Pelaksanaan Swadaya di Kabupaten Wonogiri Kecamatan Tirtomoyo adalah jumlah terbesar yaitu 91 % . Hal ini dikarenakan sebagian besar penerima bantuan di Kecamatan Tirtomoyo adalah Petani yang memiliki hasil pertanian yang banyak dan hasil ternak. Kebanyakan mereka menjual hasil ternak untuk menambah swadaya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa Stimulan dari Pemerintah berhasil. Selanjutnya diurutkan kedua adalah di Kecamatan Slogohimo hal ini dikarenakan masyarakat juga berhasil terpacu untuk menambah stimulan sehingga rumah mereka menjadi layak huni.

Sedangkan untuk besar stimulan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Jatiroto yang hanya sebesar 46 %. Hal ini dikarenakan perekonomian di sana masih kurang yang ditandai dengan jumlah stimulan yang paling sedikit. Selain itu kebanyakan penerima bantuan adalah perempuan (sebagai Kepala Keluarga) sehingga disana peran masyarakat dan Ketua RT RW sangat pokok karena yang melaksanakan kegiatan tersebut kebanyakan dari Perangkat Desa. Sehingga untuk Pelaksanaan Pembangunan ini dilaksanakan dengan gotong royong dan dapat mengurangi stimulan untuk upah tukang.

Analisa Pengukuran Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan BSPS

Pelaksanaan Peningkatan Kualitas RTLH Program BSPS di Kabupaten Wonogiri sejumlah 680 unit. Syarat penerima bantuan adalah rumah dengan kondisi rusak berat. Komponen utama rumah adalah aladin (atap, lantai, dinding) . Rumah dengan kondisi rusak berat yaitu minimal 2 komponen kerusakan harus terpenuhi terutama untuk dinding. Rumah belum ada struktur nya (pondasi, sloof, kolom, dan ringbalk) termasuk kriteria di BSPS. Untuk Lantai masih tanah , dinding belum permanen dan rangka atap dari bambu atau kayu yang sudah lapuk.

Untuk Rumah penerima bantuan BSPS di Kabupaten Wonogiri Rata – Rata tingkat kelayakan bangunan untuk ditempati sebesar < 35 % karena rata – rata lantai masih tanah dan dinding belum permanen (masih dari kayu, grc, atau gedeg) selain itu sebagian rangka atap dari bambu atau kayu yang sudah lapuk.

Pelaksanaan BSPS di Wonogiri berhasil meningkatkan kualitas rumah dan layak untuk ditempati karena sudah ada atap (meliputi rangka atap dan genteng), Dinding dan pondasi (dengan strukturnya), lantai yg sudah dipleset (bukan tanah), memiliki MCK/sanitasi, Penghawaan dan pencahayaan cukup. Sehingga Pelaksanaan BSPS ini berhasil meningkatkan kualitas rumah menjadi 90 – 100%. Peningkatan Kualitas terbesar adalah di Kecamatan Wonogiri sejumlah 99 %. Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat Kecamatan Wonogiri adalah masyarakat perkotaan. Sehingga mereka mempunyai keinginan untuk meningkatkan kualitas rumah dengan maksimal. Sehingga rumah dapat ditempati dan hasilnya baik sehingga tidak menyebabkan kekumuhan karena berada di Ibukota Kabupaten.

Tabel 3. Prosentase Kelayakan Peningkatan Kualitas RTLH Program BSPS Kabupaten Wonogiri

No	Kecamatan	Kondisi Rumah	
		Awal (%)	Akhir (%)
1	Wonogiri	34	99
2	Tirtomoyo	27	96
3	Slogohimo	32	95
4	Jatiroto	21	91
5	Purwantoro	32	93
6	Bulukerto	30	93

Sumber: Pengolahan data lapangan

Pada Gambar 1 diberikan contoh hasil peningkatan kualitas RTLH Program BSPS di Kabupaten Wonogiri :



Kondisi 0 %



Kondisi 100 %

Gambar 1. Peningkatan Kualitas RTLH di Kabupaten Wonogiri**KESIMPULAN**

Stimulan swadaya masyarakat untuk keberhasilan pembangunan rumah tidak layak huni dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Wonogiri berjalan dengan baik. Keberhasilan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Wonogiri dapat terukur dari tingkat kelayakan hunian dari sebelumnya < 35 % menjadi 90 – 100 % dan dengan melihat hasil pembangunan dari RTLH menjadi Rumah Layak Huni yang pembangunannya sesuai dengan spesifikasi Teknis Rumah Sehat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Prodi Teknik Sipil Universitas Veteran Bangun Nusantara yang telah mendukung penyusunan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA.

- Arsyad, L. (2015) *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi, Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*.
- Burns, J., Keswell, M. and Leibbrandt, M. (2005), 'Social assistance, gender, and the aged in South Africa', *Feminist Economics*. doi: 10.1080/13545700500115944.
- Cage, C. (2014), 'Transforming the social capital of the urban poor: Lessons from Kisumu, Kenya', *Development in Practice*. doi: 10.1080/09614524.2014.867306.
- Cherunya, P. C. et al. (2021) 'The challenges of livelihoods reconstruction in the context of informal settlement upgrading', *Environment and Planning A*. doi: 10.1177/0308518X20926514.
- Desiana, I. (2016) *Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulant Bedah Rumah Studi Kasus Di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji*. Universitas Lampung.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2018) *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*.
- Verhagen, K. (1996) *Pengembangan Keswadayaan (Pengalaman LSM di Tiga Negara)*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara (Puspa Swara).